



**PENGARUH AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA DINAS
TENAGA KERJA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh:

**BESTIANI OPSUNGGU
1915100247**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **PENGARUH AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA.**

NAMA : **BESTIANI OPSUNGGU**
N.P.M : **1915100247**
FAKULTAS : **SOSIAL SAINS**
PROGRAM STUDI : **Akuntansi**
TANGGAL KELULUSAN : **04 Maret 2024**

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Doni Efrizah, S.S., M.S.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BESTIANI OPSUNGGU
Npm : 1915100247
Fakultas/Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/informasikan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar:

Medan, April 2024



Bestiani Opsunggu

NPM. 1915100247

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BESTIANI OPSUNGGU
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Seri / 03-04-2002
NPM Fakultas : 1915100247
Program Studi : Sosial Sains
Alamat : Akuntansi
: JL KEMUNING RAYA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 14 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



BESTIANI OPSUNGGU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan *probability sampling* dan jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang pegawai Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data yang ada dalam penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. Uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas serta uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana yang menghasilkan adanya pengaruh pengendalian internal secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dengan koefisien determinasi sebesar 18,9%.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Akuntabilitas Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal control on financial accountability at the North Sumatra Provincial Government Manpower Office. The type of data used is quantitative. The sampling technique used is Probability sampling and the number of respondents sampled in this study was of 30 employees of the Manpower Office of the Government of North Sumatra Province. Data collection using questionnaire instruments. The tests used are validity test, reliability test and hypothesis testing. Hypothesis testing was carried out using simple linear regression analysis techniques which resulted in a positive and significant effect of internal control on financial accountability at the Manpower Office of the Government of North Sumatra Province. Internal control have an influence on the financial accountability with a coefficient of determination of 18,9%.

Keywords: Internal Control, Financial Accountability

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi dengan judul **“Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam meraih gelar sarjana strata satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., MM. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M. Si selalu Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan yang sudah banyak membantu, memberikan kritik dan saran dalam pembuatan skripsi.
5. Ibu Doni Efrizah, S.S., M.S. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah banyak membantu dalam perbaikan sistematika penulisan skripsi. Penulis

mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, saran, dan respon yang baik serta masukan yang mendukung pengerjaan skripsi ini

6. Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., Selaku Pemimpin Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak P. Opsunggu dan Ibu B. Sihombing yang sangat banyak membantu dalam pengerjaan skripsi saya, terimakasih untuk setiap Doa, semangat, motivasi, dukungan materi dan pengorbanan yang sangat luar biasa
8. Kepada teman-teman Seperjuangan saya, terimakasih untuk setiap doa, semangat dan dukungan yang kalian beri dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, April 2024

Bestiani Opsunggu
1915100247

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iiiv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agency.....	9
2.2 Organisasi Sektor Publik.....	11
2.2.1 Pengendalian Internal.....	13
2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal	15
2.2.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	17
2.2.4 Akuntabilitas Keuangan	22
2.2.5 Tujuan Akuntabilitas Keuangan.....	24
2.2.6 Unsur-unsur Akuntabilitas Keuangan	26
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	31
2.4 Kerangka Konseptual.....	33
2.5 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.2.1 Tempat Penelitian	36
3.2.2 Waktu Penelitian	36
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.3.1 Definisi Operasional	37

3.3.2 Pengukuran Variabel.....	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.4.1 Populasi Penelitian.....	39
3.4.2 Sampel Penelitian.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.7.1 Uji Kualitas Data.....	40
3.7.1.1 Uji Validitas	41
3.7.1.2 Uji Reliabilitas	41
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	42
3.7.2.2 Uji Linearitas.....	42
3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas	43
3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana	44
3.7.4 Uji Hipotesis	44
3.7.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	44
3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Objek Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.....	47
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	48
4.1.4 Unsur-Unsur SPIP Dinas Tenaga Kerja Prov Sumatera Utara	51
4.1.5 Penyajian Data	53
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Uji Kualitas Data.....	54
4.2.1.1 Hasil Uji Validitas.....	54
4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas	56
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas	58
4.2.2.2 Hasil Uji Linearitas	59
4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana	61
4.2.4 Uji Hipotesis	62
4.2.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)	62
4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.3 Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	32
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	38
Tabel 3.3 Skala Likert 5 Point.....	39
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin.....	53
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden berdasarkan usia.....	54
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X.....	55
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y.....	56
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Variabel X.....	57
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Variabel Y.....	57
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	61
Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji t).....	63
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja	50
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik. Prestasi dalam pengelolaan keuangan publik dapat dilihat dari kegiatan organisasi sehingga evaluasi kinerja sangat diperlukan dalam organisasi sektor publik. Menurut Hartanto (2018) organisasi sektor publik adalah organisasi yang menyediakan service and goods terhadap masyarakat. Suatu capaian akan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik yang bersangkutan. Salah satu kewajiban organisasi sektor publik adalah membuat akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Menurut Paramarta dan Ariyanto (2021) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dari segi ekonomis, efisien dan efektif.

Meningkatnya tuntutan umum akan tata pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan

pertanggung jawaban atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pertanggung jawaban secara berkala yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan.

Menurut Saren dkk (2022) untuk mengukur suatu akuntabilitas keuangan dapat ditinjau berdasarkan 5 indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntabilitas pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu organisasi sektor publik harus memperhatikan ketercapai keempat indikator tersebut agar akuntabilitas keuangannya berkualitas dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu organisasi sektor publik yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Salah satu kewajiban Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam hal Akuntabilitas Keuangan adalah memberikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa unsur laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Sementara laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara hanya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Artinya laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi semua unsur-unsur laporan keuangan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan organisasi sektor publik adalah aktivitas pengendalian. Menurut Rahmi (2022) pemerintah akan mampu memperoleh pelaporan keuangan yang berkualitas apabila adanya aktivitas atau sistem pengendalian yang baik dan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Aktivitas pengendalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas pengendalian internal.

Sari (2021) menjelaskan bahwa pengendalian internal (*internal control*) merupakan bagian dari perencanaan sebuah organisasi untuk mengamankan aset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal. Menurut Saparman dkk (2020) pengendalian internal merupakan komponen awal dalam sistem pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen organisasi. Herawaty dan Hernando (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sari dkk (2021)

terdapat 4 elemen dalam pengendalian internal yaitu stuktur organisasi yang memisahkan akuntabilitas dan kewenangan, sistem organisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang kinerjanya sesuai dengan kewajibannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah perlu merumuskan metode sistem pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal. Menurut Anto dkk (2022) pengendalian internal dalam pemerintahan daerah diselesaikan oleh inspektorat otoritas pemerintahan daerah untuk membantu gubernur, bupati, atau walikota dalam melakukan pengamatan terhadap penyajian unit-unit otoritatif di dalam lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramarta dan Ariyanto (2021) disebutkan bahwa “secara empiris bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Akuntabilitas keuangan dapat diterapkan jika pengendalian internal berfungsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Menurut Dewi dan Susilowati (2022) aktivitas pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan karyawan yang berguna untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal yang baik akan mempermudah pengarahan, pengawasan

serta pendeteksian *fraud* sehingga laporan keuangan yang disajikan mempunyai informasi yang andal dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul pada penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, teridentifikasi masalah adalah Laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi semua unsur-unsur laporan keuangan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan terdapat dalam Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Apakah terdapat pengaruh aktivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kajian keilmuan mengenai pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi: Meningkatkan kemampuan para akademisi mengenai pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi peneliti: Memberikan pengalaman dan meningkatkan wawasan dalam melakukan sebuah penelitian, dan sebagai pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.
- c. Bagi pemerintah: Terkhusus bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan aktivitas pengendalian agar menghasilkan akuntabilitas yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti seperti:

1. Rahmi (2022) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku”. Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yang terdiri sistem pengendalian internal, penerapan sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas saja yaitu pengendalian internal dan variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan. Penelitian terdahulu melakukan objek penelitian di

Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan dalam penelitian ini melakukan penelitian di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Zelda Triyani (2018) dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study pada Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro)”. Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian asosiatif dengan model analisis regresi linear berganda. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linear sederhana. Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yang terdiri sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal serta variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas saja yaitu pengendalian internal dan variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Dalam teori keagenan (*agency theory*), masalah agensi muncul ketika hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintahan masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa

ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Purnamasari dan Handayani, 2015). Teori agensi adalah suatu teori yang menjelaskan adanya hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) yang ada didalamnya manajemen sebagai kepentingan pemilik perusahaan dan atas tindakannya (actions) tersebut manajemen akan mendapat imbalan tertentu (suwardjono, 2013). Menurut Syarifah dan Kurnia (2017), dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik atau auditor independen yang merupakan pihak dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak shareholders dengan pihak manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, serta memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan .Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, Ichsan (2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal .

2.2 Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik. Prestasi dalam pengelolaan keuangan publik dapat dilihat dari kegiatan organisasi sehingga evaluasi kinerja sangat diperlukan dalam organisasi sektor publik. Menurut Hartanto (2018) organisasi sektor publik adalah organisasi yang menyediakan service and goods terhadap masyarakat. Suatu capaian akan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik yang bersangkutan. Salah satu kewajiban organisasi sektor publik adalah membuat akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Menurut Anggraini dkk (2020). organisasi sektor publik adalah perkumpulan dari beberapa orang dengan memiliki suatu tujuan dengan aktivitas penyedia barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Organisasi sektor publik merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani segala kebutuhan dari masyarakat. Salam (2021) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik dibentuk dengan tujuan khusus yaitu sebagai penyambung tangan pemerintah untuk membantu penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas.

Anggriany (2023) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik ialah instansi yang melaksanakan roda pemerintahan dengan tujuan guna mencukupi keperluan masyarakat berkaitan dengan pelayanan sipil. Orientasi organisasi sektor publik bukan untuk memperoleh laba melainkan untuk melayani masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kinerja dari organisasi sektor publik

menjadi sorotan seluruh kalangan masyarakat. Keberhasilan kinerjanya dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensi pada saat mempersembahkan pelayanan pada masyarakat.

Ethelbert dkk (2022) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik dalam kajian studi administrasi publik jamak dikenal dengan sebutan birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan negara dalam bentuk pelayanan publik. Konsep birokrasi mulai terkenal dan berkembang sejak Max Weber memunculkan pikirannya tentang teori sosial dan ekonomi yang dikemudian hari dikenal dengan nama birokrasi rasional. Dalam berbagai literatur administrasi publik dijelaskan konsep birokrasi rasional diperkenalkan Weber untuk menanggapi upaya Woodrow Wilson mencegah inefisiensi dan inefektifitas kerja birokrasi. Menurut Weber birokrasi harus bekerja seperti mesin agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Menurut Putranto dkk (2022) tugas organisasi publik adalah menjaga ketertiban sosial dan menyediakan sistem hukum dan keadilan bagi rakyat. Organisasi publik menyediakan barang atau jasa publik kepada rakyatnya dan karenanya membutuhkan sumber daya manusia yang efisien dan efektif untuk menyediakan layanan dengan cara yang efisien. Dewasa ini lebih banyak organisasi publik dari berbagai sektor yang memfokuskan pada area layanan yang berkualitas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Organisasi sektor publik

adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapat negara lain yang diatur dengan hukum.

2.2.1 Pengendalian Internal

Sistem yang digunakan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mengacu pada PP 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 berkenaan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan jika sistem pengendalian internal merupakan proses yang terintegrasi dengan respon dan kegiatan yang dilaksanakan dengan berkelanjutan oleh pimpinan dan semua pegawai guna memastikan bahwa sasaran organisasi akan tercapai dengan aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Menurut Wijayanti dan Setyawan (2023) pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar.

Hastuti dkk (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik dan efektif bermanfaat dalam mencegah buruknya kondisi keuangan serta membantu organisasi untuk bekerja secara efektif sambil mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam. Sistem pengendalian intern juga memainkan peran penting dalam aktivitas audit intern karena merupakan hal yang pertama kali diperiksa oleh auditor dalam pekerjaan auditnya. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu komponen struktur tata kelola organisasi, yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Sistem pengendalian intern memiliki hubungan dengan manajemen risiko dan tata kelola dalam suatu sistem tata kelola organisasi. Dia merupakan bagian terdalam dan yang pertama-tama harus diperiksa oleh audit intern dalam rangka mencapai misinya untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, setelah itu barulah manajemen risiko dan kemudian tata kelola.

Menurut Mindhari dkk (2020) sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Salah satu cara untuk melihat keefektifitasan suatu pengendalian internal adalah dengan sebuah kesalahan atau mismanagement karena hal tersebut berkaitan langsung dengan standar operasional pada sebuah perusahaan. Salah satu tujuan pengendalian internal adalah untuk mencegah adanya penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan yang dapat dilakukan oleh karyawan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian intern memiliki tujuan yang sangat penting bagi setiap organisasi kecil maupun besar. Manajer tidak dapat mengawasi secara pribadi segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi mereka harus mendelegasikan kewenangannya kepada bawahan yang berfungsi sebagai wakilnya. Bawahan tersebut akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Seiring dengan pemberian tanggung jawab muncul pula akuntabilitas, yang membutuhkan bahan bukti bahwa tugas yang dibebankan telah diselesaikan. Bukti tersebut biasanya dalam bentuk laporan yang membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan.

Aktivitas pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon bentuk risiko instansi dan memastikan bahwa respon tersebut sudah efektif. Empat tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:163) yaitu:

1. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

Perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang diteliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
3. Mendorong efisiensi. Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis Perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya Perusahaan yang tidak efisien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan Perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya system informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan Perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu Perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan.

Sedangkan menurut Arens et al (2015:340) menyatakan penjelasan mengenai ketiga tujuan dari pengendalian intern yaitu:

1. Reliabilitas laporan keuangan. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditur dan pemakai lainnya. Tujuannya adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektif operasi. Pengendalian internal dalam Perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran Perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan hukum dan peraturan. Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi public maupun non public dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

2.2.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, model dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam undang-undang SPIP PP 60 Tahun 2008 terdapat unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*informasi and communication*), dan pemantauan pengendalian internal (*monitoring*). Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui.

- a. penegakan integritas dan nilai etika
- b. komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

2. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Dalam mengidentifikasi risiko harus dilaksanakan dengan:

1. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis risiko

Analisis risiko sebagaimana dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam menganalisis risiko Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima

Dalam mencapai Tujuan dalam melakukan penilaian risiko oleh Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan dua strategi yaitu:

- a. Strategi operasional yang konsisten
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko

Dalam menetapkan kedua strategi tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah
- b. Saling melengkapi, Saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran
- e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Adapun Karakter kegiatan pengendalian adalah:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan yang dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

a. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

2.2.4 Akuntabilitas Keuangan

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti penanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dari segi ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Pratiwi dan Muliastari (2020) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan hal yang penting karena dengan keterbukaan informasi keuangan bagi masyarakat maka masyarakat mampu menilai kinerja organisasi yang mengeluarkan akuntabilitas.

Menurut Abdullah dan Nugraha (2020) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi/perusahaan. Konsep akuntabilitas penting untuk dilaksanakan tidak hanya terhadap pemegang saham maupun dewan pengawas (*direct stakeholder*) melainkan terhadap semua pihak yang terlibat, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan.

Menurut Paramarta dan Ariyanto (2021) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Fitri dan Khotimah (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan hasil laporan pertanggung jawaban dalam menggunakan dana negara secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana negara.

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari sekedar transparansi karena akuntabilitas memungkinkan adanya *negative feedback* setelah keputusan atau tindakan diambil, sedangkan transparansi memungkinkan *negative feedback* sebelum dan selama keputusan atau tindakan diambil. Akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi. Menurut Idawati (2019) akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bentuk laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Penyajian akuntabilitas keuangan adalah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas negara yang disajikan atau didukung dari laporan keuangannya.

2.2.5 Tujuan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah alat untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan kejadian nyata serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi dan dibenarkan. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ghartey (dalam Nurhayati dan Riharjo, 2019) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilaksanakan.

Sejalan dengan itu, Nursin dan Pakaya (2022) menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas keuangan adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggung jawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan

dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Menurut Swasanany (2019) akuntabilitas merupakan hal yang prinsip dan dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain; apa yang harus dipertanggungjawabkan; mengapa pertanggung jawaban harus dibuat dan disampaikan; kepada siapa pertanggungjawab tersebut diserahkan; siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat; apakah pertanggungjawaan berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai; dan hal terkait lainnya. Melihat pada fungsinya, Akuntabilitas kinerja publik memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan *users* yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah).
2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Dari penjelasan di atas tergambar pentingnya akuntabilitas pada sektor publik, karena dalam kinerja pemerintahan, yang merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/pogram yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur untuk kepentingan publik. Akuntabilitas pada sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan fokus tidak hanya pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga lebih kepada bagaimana mencapai outcomes dengan efisien dan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama dari penerapan akuntabilitas keuangan dalam organisasi publik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi strategi untuk mencegah praktik korupsi; menekankan pertanggung jawaban dari tindakan para aktor yang terlibat; dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. Maka dari itu, terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggung jawaban horizontal yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggung jawaban vertical yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

2.2.6 Unsur-unsur Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 komponen dari akuntabilitas keuangan terdiri dari:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap yang harus secara transparan dan membutuhkan partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

3. Pelaporan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.

4. Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan pemerintah adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah saat penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan daerah tersebut menjadi tanggungjawab kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pengawasan

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan oleh pemegang amanah (*agent*) kepada pemberi amanah (*principal*), dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dan dipercayakan. Akuntabilitas dapat diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mahmudi (dalam Suharti dan Rumsari, 2021) antara lain:

1. Aspek hukum dan kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati hukum yang berlaku.
2. Aspek manajerial, adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Aspek program, menghendaki organisasi membuat program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat.
4. Aspek kebijakan, terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dan
5. Aspek finansial, adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.2.7 Komponen Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Laporan realisasi anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundangundangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai analisis sistem informasi akuntansi sektor publik pada kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan dalam melengkapi penelitian selanjutnya. Dalam menyusun penelitian ini, penulis

mendapatkan ide, motivasi dan dorongan serta referensi penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Idawati (2019)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Keuangan Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan faktor akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang Baik
2	Suharti & Rumsari (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Variabel Dependen : Akuntabilitas Pemerintah Desa	Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh, sedangkan kompetensi secara parsial tidak berpengaruh, namun secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa telah menggunakan sistem berbasis computer, yang sangat membantu aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.
3	Rahmi (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian	Variabel Independen : Sistem	Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan

		Internal, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku	Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Independen : Kualitas Laporan Keuangan	keuangan, penerapan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4	Fitri & Khotimah (2022)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Variabel Independen : Kinerja Keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Solvabilitas tidak berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan sedangkan efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan
5	Anggriany (2023)	Pengaruh Kepemimpinan Transformasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik	Variabel Independen Kepemimpinan Transformasi, Sistem Pengendalian Intern, Inovasi Variabel Dependen : Kinerja Organisasi Sektor Publik	Kepemimpinan transformasional, sistem pengendalian intern, dan inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi sektor publik yang baik dipengaruhi oleh penerapan kepemimpinan transformasional, sistem pengendalian intern, dan inovasi yang baik.

(Sumber: diolah penulis, 2023)

2.4 Kerangka Konseptual

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan organisasi sektor publik adalah aktivitas pengendalian internal. Pemerintah akan mampu memperoleh pelaporan keuangan yang berkualitas apabila adanya aktivitas atau sistem pengendalian yang baik dan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pengendalian internal merupakan bagian dari

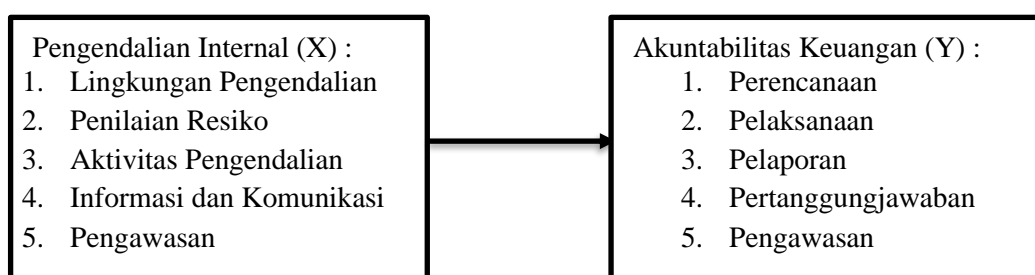
perencanaan sebuah organisasi untuk mengamankan aset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal.

Pengendalian internal merupakan komponen awal dalam sistem pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen organisasi. Pengendalian internal bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah perlu merumuskan metode sistem pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal. Pengendalian internal dalam pemerintahan daerah diselesaikan oleh inspektorat otoritas pemerintahan daerah untuk membantu gubernur, bupati, atau walikota dalam melakukan pengamatan terhadap penyajian unit-unit otoritatif di dalam lingkungannya. Secara empiris sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas keuangan dapat diterapkan jika pengendalian internal berfungsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian kerangka konseptual tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



(Sumber:diolah penulis, 2023)

2.5 Hipotesis

Aktivitas pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Wijayanti dan Setyawan, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Suharti dan Rumsari (2021) dan Anggriany (2023) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik, dimana salah satunya adalah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_a: Terdapat pengaruh aktivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Ibrahim (2018) pendekatan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif, sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dinas tersebut beralamat Jalan Asrama Nomor 143, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20126.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah saat tertentu untuk melakukan penelitian. Peneliti akan melaksanakan penelitian pada tahun 2023. Laporan keuangan yang diteliti pada tahun 2020 dan 2021. Rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023									
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Riset Awal	■									
2	Penyusunan Proposal	■	■	■							
3	Bimbingan Proposal		■	■	■						
4	Seminar Proposal					■					
5	Pengumpulan Data					■	■				
6	Analisis Data						■	■			
7	Penyusunan Laporan						■	■	■		
8	Seminar Hasil										■
9	Perbaikan Skripsi										
10	Sidang Skripsi										

(Sumber: diolah penulis, 2023)

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi cara pengukuran suatu variabel, sehingga dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel-variabel tersebut. Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pengendalian Internal (X)	Pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (Wijayanti dan Setyawan, 2023)	a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Aktivitas pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan	Likert
Akuntabilitas Keuangan (Y)	Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Paramarta dan Ariyanto, 2021)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Pertanggungjawaban e. Pengawasan	Likert

3.3.2 Pengukuran Variabel

Berdasarkan tabel definisi operasional di atas, pengukuran variabel ini menggunakan pengukuran skala likert, dengan menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Menurut Sugiyono (2018: 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya/ jawabannya mengenai pertanyaan indikator variabel yang telah peneliti tentukan, dan untuk skor dari setiap jawaban oleh responden, peneliti menentukan dengan skala likert 5 point yaitu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Likert 5 Point

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah subyek penelitian secara keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebanyak 30 orang.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik *probabilitas sampling* yaitu menggunakan sampling jenuh atau seluruhnya digunakan sebagai sampel. dari jumlah populasi atau sebanyak 30 orang pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner tentang variabel terkait berupa jawaban para responden atas daftar pertanyaan yang diajukan peneliti. Kemudian dari data hasil pendapat responden diolah dalam bentuk angka data kuantitatif dengan menggunakan program *Statistical Package for Sosial Science (SPSS)*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner aktivitas pengendalian internal, dan akuntabilitas keuangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana yang dimana untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional serta sistematis. Sebelum menguji asumsi klasik dan hipotesis terlebih dahulu harus menguji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Dengan tahapan sebagai berikut:

3.7.1. Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:75) validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai total *correlated item* (r_{hitung}) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “valid”.
- b. jika nilai $r_{hitung} < r_{table}$, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak valid”.

Cara untuk mengetahui nilai r_{tabel} yaitu dengan menyesuaikan n / total sampel penelitian dengan tabel distribusi nilai r_{tabel} yang didapatkan dari internet.

3.7.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono 2016:75) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan terhadap butir-butir instrumen yang valid, yang diperoleh melalui uji validitas. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Alat ukur yang digunakan untuk menguji reliabilitas data adalah uji reabilitas dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. Kriteria suatu uji reabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,60$
- b. Suatu variabel dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* (α) $< 0,60$

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji layak tidaknya model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3 yaitu uji normalitas, uji linearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1. Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono 2016) “Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Sminorv* test (1- Sampel K-S). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05.

- a. Apabila nilai sign hitung $> 0,05$ maka data terdistribusi normal,
- b. Apabila nilai sign hitung $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

3.7.2.2. Uji Linearitas

Menurut Priyatno (2017:95) uji linearitas bertujuan untuk mengetahui linearitas data yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi person atau

regresi linear. Pengujian dalam SPSS dengan menggunakan *Test for Linearty* pada taraf signifikansii 0,05. Uji linieritas dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika *Devation from Lineartty sig* $> 0,05$ maka terdapat hubungan secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.
- b. Jika *Devation from Lineartty sig* $< 0,05$ maka tidak terdapat hubungan secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

3.7.2.3. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Sugiyono 2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized (Ghozali, 2011, p. 139). Uji heteroskedastisitas berupa uji glejser dengan meregresi nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap variabel independen.

- a. Jika signifikan (sig) $t > 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b. Jika signifikan (sig) $t < 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.7.3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Penelitian dengan metode regresi sederhana bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variable bebas (independen) terhadap variable terikat (dependen) (University, 2021). Dalam hal ini, bagaimana pengaruh variable independen yang digunakan untuk analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien Arah Regresi

X_1 = Aktivitas pengendalian

e = Error

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Sugiono 2016) uji t digunakan untuk menguji hipotesis apabila peneliti menganalisis regresi parsial (sebuah variabel bebas dengan sebuah variabel terikat). Maka pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan

Adapun kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $\text{sig } \alpha < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $\text{sig } \alpha > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahui nilai t tabel adalah dengan rumus $t = \alpha/2; (n-k-1)$. Dengan hasil rumus t tabel yang telah didapatkan selanjutnya dapat menyesuaikan hasil rumus t tabel dengan tabel distribusi t tabel yang didapatkan dari internet.

3.7.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2016:83), Koefisien determinasi berganda atau Rsquare (R^2) adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Besarnya R square (R^2) sebuah variabel independen menyatakan dominansi efek variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang sudah sesuai antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang mengarah nilai ke 1 artinya daya mampu variabel independent memberi seluruh informasi yang diperlukan dalam memperkirakan variabel dependen. Nilai R^2 terkecil ataupun kurang dari 0,05 artinya daya mampu variabel independent menerangkan variabel dependen terkecil. (Ghozali,2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terletak di Jln. Asrama No. 143 Medan yang berdiri sejak tanggal 13 Juli 2001 dan sebelum menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah beberapa kali mengalami perubahan nama antara lain :

- a. Departemen Transmigrasi dan Sosial.
- b. Departemen Tenaga Kerja dan Koperasi.
- c. Departemen Tenaga Kerja.
- d. Departemen Transmigrasi.
- e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun setelah ada Undang – undang No. 22 Tahun 1999 serta di tetapkan PERDA (Peraturan Daerah) No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas Provinsi Sumatera Utara, maka kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di ubah menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan gabungan dan pengintegrasian dari :

- a. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang beralamat di Jln. Asrama No. 143 Medan, yang dipimpin oleh Bapak Drs. Moch Chodjin.
- b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jln. SM. Raja Medan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Iwan Rifai, MM.

- c. Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH yang beralamat di Jln. William Iskandar No. 331 Medan yang dipimpin Ir. Aziz Zeid Gumai.

Tujuan dari 3 (tiga) Kantor Dinas Provinsi Sumatera Utara adalah untuk Efisien waktu, Tenaga dan dana yang diinvestasikan untuk ketiga kantor ini. Selain dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PERDA No. 3 Tahun 2001 perubahan ini juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Perubahan atau penggantian Kabinet.
- b. Dilikuidasinya beberapa Departemen sehingga banyak Departemen yang digabungkan
- c. Otonomi Daerah

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Sejahtera”

Maka yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.
2. Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
3. Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
4. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja.
5. Terwujudnya kesejahteraan pekerja dan purna kerja.
6. Terwujudnya penataan persebaran penduduk dengan “ 3S “ yaitu serasi, seimbang dan sejahtera.

Sedangkan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dan perluasa tenaga kerja.
2. Meningkatkan dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta kesejahteraan tenaga dan purna kerja.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perlindungan tenaga kerjaan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan penataan persebaran penduduk yang serasi, seimbang dan sejahtera

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi merupakan suatu perwujudan yang menunjukkan hubungan antar fungsi serta wewenang dan tanggung jawab, yang berhubungan satu sama lain dari masing – masing orang yang jabatan dari organisasi atau instansi. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kepala Sub Bagian Umum
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan
- f. Kepala Sub Bagian Program
- g. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
 - 1) Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja

3) Seksi Standarisasi Kompetensi Pemagangan

h. Kepala Bidang Hubungan Industrial

1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial

2) Seksi Kelembagaan dan Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha

3) Seksi Penyelesaian Perselisihan

i. Kepala Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan

1) Seksi Ketenagakerjaan

2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Khusus

j. Kepala Bidang Transmigrasi

1) Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan

2) Seksi Pembangunan Permukiman

3) Seksi Penempatan dan Investasi

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

4.1.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Dinas Tenaga Kerja Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara

Upaya untuk menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah secara utuh dimulai dengan pemenuhan aturan unsur dalam SPIP tersebut. Berikut ini adalah pedoman system pengendalian internal pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Adanya kebijakan dan SOP yang mengatur tentang aturan perilaku (kode etik) dalam Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang memuat antara lain :

- a. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai misalnya pegawai tidak boleh terlambat, tidak boleh menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba dan sejenisnya dan tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan
- b. Ketentuan gratifikasi, benturan kepentingan, kegiatan politik bagi pegawai
- c. Ketentuan yang mengatur mengenai keharusan pimpinan untuk mendokumentasikan jika terdapat keputusan yang harus diambil karena regulasi yang ada tidak mengatur atau tidak jelas mengatur

2. Penilaian Resiko

Adanya kebijakan dan SOP yang mengatur tentang penilaian resiko yang memuat antara lain :

- a. Metodologi identifikasi resiko mencakup pemeringkatan secara kualitatif dan kuantitatif

- b. Pembahasan pada tingkat pimpinan, perkiraan dan perencanaan strategis serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi sistem pengendalian internal Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - c. Metodologi identifikasi resiko diterapkan untuk resiko-resiko yang menghambat pencapaian tujuan entitas K/L/D maupun tujuan kegiatan
3. Kegiatan Pengendalian

Adanya kebijakan dan SOP yang mengatur tentang review kinerja terkait SOP pengukuran kinerja, SOP evaluasi kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja diperlukan keterlibatan pimpinan (rapat kegiatan, rapat koordinasi) yang dilakukan secara berkala untuk membandingkan kinerja dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
 - a. Adanya peraturan atau prosedur tentang informasi dan komunikasi/kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dan relevan dalam mencapai tujuan organisasi dan kesesuaian informasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perubahan politik dan ekonomi
 - b. Adanya kebijakan dan SOP tentang Juklak yang mengatur kewajiban organisasi untuk mengelola informasi internal dan eksternal melalui sistem atau metode yang sistematis dalam perolehan, pengolahan, pemanfaatan dan penyebarluasan secara tepat waktu dan akurat
 - c. Adanya pengkomunikasian peraturan informasi yang relevan kepada pegawai berkepentingan di organisasi/unit kerja

- d. Adanya bukti pelaksanaan infroamsi yang relevan serta dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan/terkait sehingga memungkinkan dilakukan pengecekan dan Tindakan korektif secara tepat.

5. Pemantauan

Pimpinan telah memiliki kebijakan dan SOP terkait pemantauan berkelanjutan terkait kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit.

4.1.5 Penyajian Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini, maka dibuat klasifikasi responden dengan karakteristik data sebagai berikut :

1. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	20
Total		30

(sumber : data diolah sendiri,2023)

2. Klasifikasi responden berdasarkan usia

Tabel 4.2

Klasifikasi responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	<25	22
2	25-35	5
3	36-50	3
Total		30

(sumber: data diolah sendiri,2023)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

4.2.1.2 Hasil Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Atau bisa dibuat dengan rumus jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dinyatakan valid. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS v.23 dengan jumlah sampel $N=30$ dengan taraf signifikan

0.05 atau 5%. Adapun hasil pengolahan uji validitas yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X)

Pernyataan	Variabel X			
	Pearson Correlation (R_{hitung})	R_{tabel}	P-Value (Sig)	Status
1	0,494	0,3610	0,006	Valid
2	0,783	0,3610	0,000	Valid
3	0,689	0,3610	0,000	Valid
4	0,577	0,3610	0,001	Valid
5	0,414	0,3610	0,023	Valid
6	0,658	0,3610	0,000	Valid
7	0,607	0,3610	0,000	Valid
8	0,553	0,3610	0,002	Valid
9	0,464	0,3610	0,010	Valid
10	0,630	0,3610	0,000	Valid
11	0,759	0,3610	0,000	Valid
12	0,643	0,3610	0,000	Valid
13	0,560	0,3610	0,001	Valid
14	0,603	0,3610	0,000	Valid
15	0,648	0,3610	0,000	Valid
16	0,530	0,3610	0,003	Valid
17	0,617	0,3610	0,000	Valid
18	0,716	0,3610	0,000	Valid
19	0,618	0,3610	0,000	Valid
20	0,812	0,3610	0,000	Valid

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji validitas dari pengendalian internal (X) memiliki kriteria valid untuk semua butir pernyataan yaitu nilai signifikansi $< 0,05$ dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu nilai r_{tabel} sebesar 0,3610. Dimana untuk mendapatkan r_{tabel} didapatkan dari ketentuan distribusi r_{tabel} dengan signifikansi 5% atau 0,05.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pernyataan	Variabel Y			
	Pearson Correlation (R_{hitung})	R_{tabel}	P-Value (Sig)	Status
1	0,614	0,3610	0,000	Valid
2	0,606	0,3610	0,000	Valid
3	0,813	0,3610	0,000	Valid
4	0,730	0,3610	0,000	Valid

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji validitas dari akuntabilitas keuangan (Y) memiliki kriteria valid untuk semua butir pernyataan yaitu nilai signifikansi $< 0,05$ dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu nilai r_{tabel} sebesar 0,361. Dimana untuk mendapatkan r_{tabel} didapatkan dari ketentuan distribusi r_{tabel} dengan signifikansi 5% atau 0,05.

4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variable atau konstruk. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan penulis dengan menggunakan metode koefisien *Cornbach Alpha* (α) dengan menggunakan program aplikasi SPSS v. 23. Kriteria suatu uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Suatu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* (α) $> 0,60$
- b. Suatu variable dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* (α) $< 0,60$

Berikut ini adalah hasil pengolahan uji reliabilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas Pengendalian Internal (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,667	20

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel pengendalian internal (X) yang memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 sehingga terbukti reliabel.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Keuangan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,639	4

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Table 4.6 menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel akuntabilitas keuangan (Y) yang memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 sehingga terbukti reliabel.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan program aplikasi SPSS v.23.

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji ini digunakan dalam penelitian dengan menggunakan statistic Uji Kolmogrov-Smirnov. Kriteria suatu uji normalitas adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai sign hitung $> 0,05$ maka data terdistribusi normal,
- b. Apabila nilai sign hitung $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,76173278
Most Extreme Differences	Absolute	0,109
	Positive	0,069
	Negative	-0,109
Test Statistic		0,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan perhitungan *Kolmogrov Smirnov* dengan nilai signifikansi $> 0,005$ yaitu 0,200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi dengan normal.

4.2.2.2 Hasil Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui linearitas data yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi person atau regresi linear. Pengujian dalam SPSS dengan menggunakan *Test for Linearty* pada taraf signifikansii 0,05. Uji linieritas dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika *Devation from Lineartty sig* > 0,05 maka terdapat hubungan secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.
- b. Jika *Devation from Lineartty sig* < 0,05 maka tidak terdapat hubungan secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas Keuangan * Pengendalian Internal	Between Groups	(Combined)	51,467	14	3,676	1,216	0,355
		Linearity	0,046	1	0,046	0,015	0,004
		Deviation from Linearity	51,421	13	3,955	1,309	0,306
	Within Groups		45,333	15	3,022		
	Total		96,800	29			

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Berdasarkan table 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai *deviation from linearty sig* > 0,05 yaitu 0,306 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu terdapat pengaruh secara signifikan variabel pengendalian internal

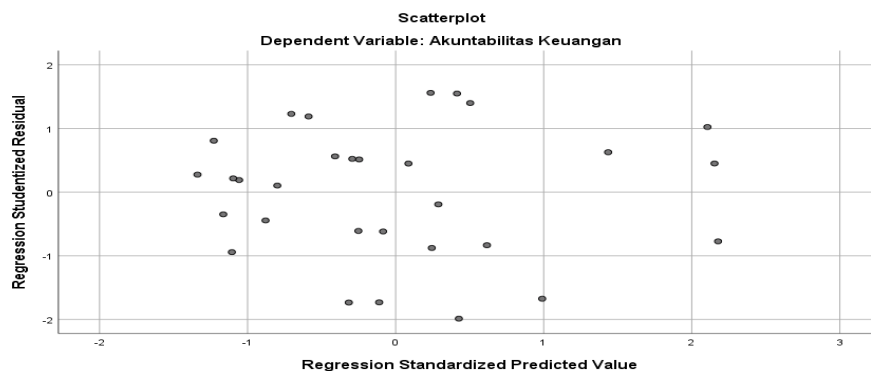
terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas berupa uji glejser dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent. Kriteria suatu uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

- Jika signifikan (sig) $t > 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Jika signifikan (sig) $t < 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan grafik scatterplot bahwa pada tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas pada penyebaran

data tersebut. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variable bebas (independen) terhadap variable terikat (dependen). Persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien Arah Regresi

X_1 = Aktivitas pengendalian

e = Error

Tabel 4.9

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,915	6,225		2,878	0,008		
	Pengendalian	0,208	0,074	0,022	3,115	0,009	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Model persamaan regresi linear sederhana adalah :

$$Y = 17,915 + 0,208X + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 17,915 adalah nilai tetap yang artinya akuntabilitas keuangan (Y) tidak terdapat pengaruh dari variabel system pengendalian internal maka nilainya sebesar 17,915
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel system pengendalian internal (X) sebesar 0,208 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen pada variabel system pengendalian internal sebesar 0,208. Nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,009 < 0,05$) maka H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.2.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t).

4.2.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis apabila peneliti menganalisis regresi parsial (sebuah variabel bebas dengan sebuah variabel terikat). Berikut ini adalah hasil uji parsial (uji t) :

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,915	6,225		2,878	0,008		
	Pengendalian	0,208	0,074	0,022	3,115	0,009	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

(Sumber: diolah penulis, 2023)

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,115 dengan signifikansi 0,009 untuk jumlah data sebesar 30 dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,04. karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (t_{hitung} 3,115 > t_{tabel} 2,04). dan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$ maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi :

Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,022 ^a	0,189	0,035	1,859
a. Predictors: (Constant), Pengendalian				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan				

(Data diolah peneliti, SPSS v.23)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,189 atau 18,9% yang artinya besar pengaruh pengendalian internal (X) dengan indikator lingkungan pengendalian, penilai resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 18,9%. Sedangkan pengaruh sisa yang sebesar 81,1% dijelaskan oleh variabel atau factor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel system pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan yang dapat dibuktikan dengan melakukan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Dalam pengujian uji parsial (uji t) dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,115 dengan signifikansi 0,009 untuk jumlah data sebesar 30 dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,04. karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (t_{hitung} 3,115 > t_{tabel} 2,04). dan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam

pengujian uji F dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai F_{hitung} sebesar 4,213. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4,213 > 4,18$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Artinya bahwa sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan system pengendalian internal dengan baik dan sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini juga mengandung bahwa semakin baik indikator pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian internal, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang dimiliki pegawai Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mampu meningkatkan akuntabilitas. Besar pengaruh pengendalian internal (X) dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaia resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 18,9%. Sedangkan pengaruh sisa yang sebesar 81,1% dijelaskan oleh variabel atau factor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Sistem pengendalian internal ini didukung oleh teori keagenan (*agency theory*) dimana pemerintah daerah sebagai agen yang mempunyai tanggungjawab kepada *principal* (masyarakat). Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu faktor yang paling utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik akan mampu

menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharti dan Rumsari (2021) dan Anggriany (2023) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik, dimana salah satunya adalah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1. Pengendalian internal di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah dibuat dan diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian parsial atau uji t, pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 5 unsur yang dimilikinya. Semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka semakin baik pula akuntabilitas keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil pengujian simultan atau uji F, Besar pengaruh pengendalian internal (X) dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaiia resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 18,9%. Sedangkan pengaruh sisa yang sebesar 81,1% dijelaskan oleh variabel atau factor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah untuk Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat terus meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintahan dengan meningkatkan akuntabilitas serta pengawasannya. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas (variabel X) lain yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y., & Nugraha, A. W. (2020). Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Persepektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Muntaz Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 77-88. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Aditya Paramarta, I., & Ariyanto, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1097-1109. Doi: [10.24843/EJA.2021.v31.i05.p03](https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p03).
- Anggriany. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Internal dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. Universitas Trisakti. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet>.
- Anggun Meita Anggraini, R. M. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Pengukuran Kinerja pada Organisasi Sektor Publik. *STIE Kesuma Negara Billar*.
- Arens, A.A., Elder R.J., Beasley M.S., dan Amir, A.J. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance*, Jilid I. Edisi Keduabelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Infromasi Akuntansi (SIA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *Forum Manajemen* 17(2), 1-11.
- Dewi, D.S., & Susilowati, E. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 4(2), 1049-1064. <https://ojs3.unpatti.ac.id/>.

- Fitri, & Khotimah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. ISSN:2302-9315.
- Hartanto, & Diansyah. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business Studies*, 3(1), 45-47.
- Hastuti dkk. (2021). *Pengaruh Good University Governance, Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. 1(1), 16-30.
- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Infromasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muliasari, R. & Hidayat, A., (2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 28-36.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Nurhayati., Ifa, K., & Paramita, R. (2019). Pengaruh Return on Equity (ROE). Current Ratio (CR) dan Debt To Equity (DER) Terhadap Nilai Perusahaan. E-ISSN: 2715-8586.
- Nursin, Erwin, Sartika Pakaya. (2022). Akuntabilitas Keuangan Unit Pelayanan Samsat Dalam Samsat Kabupaten Banggai. Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, D. (2017). *SPSS Panduan Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. ANDI.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan edisi ketiga*. Yogyakarta: BPEE- YOGYAKARTA.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Saparman, Ridwan, Din, M., Jamaluddin, Laupe, S., Iqbal, M., & Betty. (2020). The Effect of Local Apparatus Competence, Financial Reporting Compliance and Internal Control Environment on Fraud Prevention: *The Role of Local Assistants as Moderation Variable. Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and Education*, 163, 57-60.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Swasanany, Winantuningtyas Titi. (2019). *Akuntabilitas Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Syarifah, Atika Noor dan Kurnia. (2017). "Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Pemberian Opini *Audit Going Concern*". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No.5 Hal: 2032-2050.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Wijayanti, L.E., & Setiawan, W. (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Factors Affecting Compliance with Internal Control*. 9(November). 14-28.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Zelda Triyani dan Chara Pratami Tridespania Tubarad. (2018). Pengaruh Sistem Infromasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 11-30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.